



REALISASI APBN
TAHUN ANGGARAN 2014

Tanggal : 1 Januari 2014 s.d. 31 Oktober 2014

(dalam triliun rupiah)

URAIAN	APBNP*	REALISASI	
		JUMLAH	%
A. PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH	1.635,4	1.218,7	74,5
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	1.633,1	1.216,4	74,5
1. PENERIMAAN PERPAJAKAN	1.246,1	906,6	72,8
a. Pajak Dalam Negeri	1.189,8	869,2	73,0
i. Pajak Penghasilan	569,9	437,3	76,7
- Migas	83,9	74,5	88,8
- Non - Migas	486,0	362,8	74,6
ii. Pajak Pertambahan Nilai	475,6	317,7	66,8
iii. Pajak Bumi dan Bangunan	21,7	14,8	67,9
iv. Cukai	117,5	94,5	80,5
v. Pajak lainnya	5,2	4,8	93,6
b. Pajak Perdagangan Internasional	56,3	37,4	66,5
i. Bea Masuk	35,7	26,7	74,9
ii. Bea Keluar	20,6	10,7	51,8
2. PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK	386,9	309,9	80,1
a. Penerimaan Sumber Daya Alam	241,1	190,9	79,2
i. Migas	211,7	169,9	80,3
ii. Non Migas	29,4	21,0	71,2
b. Bagian Laba BUMN	40,0	36,2	90,4
c. PNPB Lainnya	85,0	63,4	74,6
d. Pendapatan BLU	20,9	19,4	92,9
II. HIBAH	2,3	2,2	95,8
B. BELANJA NEGARA	1.876,9	1.412,7	75,3
I BELANJA PEMERINTAH PUSAT	1.280,4	930,0	72,6
1. Belanja Pegawai	258,4	203,4	78,7
2. Belanja Barang	195,2	113,1	57,9
3. Belanja Modal	160,8	71,4	44,4
4. Pembayaran Kewajiban Utang	135,5	113,3	83,6
a. Utang Dalam Negeri	120,6	101,7	84,4
b. Utang Luar Negeri	14,9	11,6	77,7
5. Subsidi	403,0	354,6	88,0
a. Subsidi Energi	350,3	324,5	92,6
i. BBM (Pertamina)	246,5	228,6	92,7
ii. Listrik (PLN)	103,8	96,0	92,4
b. Subsidi Non Energi	52,7	30,0	57,0
6. Belanja Hibah	2,9	0,3	10,9
7. Bantuan Sosial	96,7	71,7	74,2
8. Belanja Lainnya	27,9	2,3	8,4
II. TRANSFER KE DAERAH	596,5	482,7	80,9
1. Dana Perimbangan	491,9	402,2	81,8
a. Dana Bagi Hasil	117,7	71,7	61,0
b. Dana Alokasi Umum	341,2	312,5	91,6
c. Dana Alokasi Khusus	33,0	18,0	54,5
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	104,6	80,5	77,0
a. Dana Otonomi Khusus	16,1	14,5	89,5
b. Dana Penyesuaian	88,5	66,1	74,7
C. KESEIMBANGAN PRIMER	(106,0)	(80,8)	76,2
D. SURPLUS/DEFISIT ANGGARAN (A - B)	(241,5)	(194,1)	80,4
E. PEMBIAYAAN	241,5	250,1	103,6
I. PEMBIAYAAN DALAM NEGERI	254,9	275,8	108,2
1. Perbankan dalam negeri	5,4	4,6	84,4
2. Non-perbankan dalam negeri	249,5	271,2	108,7
a. Privatisasi	0,0	0,0	0,0
b. Hasil Pengelolaan Aset	1,0	0,4	38,8
c. Surat Berharga Negara (neto)	265,0	272,1	102,7
d. Pinjaman Dalam Negeri	2,2	0,0	1,7
e. Dana Investasi Pemerintah	(9,3)	(1,3)	14,0
f. Dana Pengembangan Pendidikan Nasional	(8,4)	0,0	0,0
g. Kewajiban Penjaminan	(1,0)	0,0	0,0
II. PEMBIAYAAN LUAR NEGERI (neto)	(13,4)	(25,7)	191,3
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	54,1	20,0	37,0
a. Pinjaman Program	16,9	9,2	54,7
b. Pinjaman Proyek	37,2	10,8	28,9
2. Penerusan SLA	(3,4)	(0,4)	10,3
3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang LN	(64,2)	(45,4)	70,7

Catatan :

* Pagu berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2013 tentang APBN TA 2014 yang disajikan berdasarkan klasifikasi akuntansi dan Keppres Nomor 25 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Keppres Nomor 29 Tahun 2013 tentang Rincian Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2014

(1) Laporan disusun berdasarkan data realisasi sementara s.d. 31 Oktober 2014

(2) Laporan merupakan *unaudit report* (belum diaudit oleh BPK)